



Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu di India Dalam Kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019

Atmani Anggit Lestari^{1*}, M. Syaprin Zahidi¹, Mohd. Agoes Aufiya¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Korespondensi: anggitlestari217@gmail.com

Info Artikel

Diterima 23
Desember 2022

Disetujui 03
Februari 2023

Dipublikasikan 09
Februari 2023

Keywords:
Citizenship
Amendment Act
(CAA) 2019;
Narendra Modi;
Nasionalisme
Hindu; India;
Pemerintah.

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan polarisasi penguatan nasionalisme Hindu melalui penetapan kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 oleh Narendra Modi di India. Dimana isi serta implementasi dari kebijakan tersebut tidak berkorelasi dengan konstitusi India yang ada. India sendiri diketahui sebagai negara sekular yang seharusnya tidak memasukkan permasalahan agama dalam lingkup politik. Adanya kebijakan CAA ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap keamanan domestik disebabkan oleh berbagai pertikaian antar masyarakat yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan konsep politik identitas dan pendekatan primordialisme. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan teknik kepustakaan (library research) dengan dasar informasi yang berbasis dokumen (document basic research). Hasil dari penelitian ini adalah India yang merupakan negara sekular telah mengeluarkan kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 yang bersifat irrelevant dari konstitusinya. Jika dilihat melalui proses pembuatan kebijakan India yang baik, keputusan pembuatan kebijakan CAA ini dirasa kurang memenuhi idealitas suatu kebijakan domestik. Kebijakan ini juga terlihat lebih condong melindungi kelompok mayoritas, Hindu. Kebijakan ini juga dianggap sebagai polarisasi pemerintah dengan tujuan membangun negara hindu, memperbanyak dukungan, dan memperkokoh kekuasaan mereka.

Abstract

This study aims to describe the polarization of the strengthening of Hindu nationalism through the establishment of the 2019 Citizenship Amendment Act (CAA) policy by Narendra Modi in India. Where the content and implementation of these policies are not correlated with the existing Indian constitution. India itself is known as a secular country that should not include religious issues in the political sphere. The existence of this CAA policy has a considerable influence on domestic security caused by various inter-community disputes that occur. This research is a descriptive research with the concept of identity politics and primordialism approach. This study also uses qualitative methods with library research on the basis of document-based information (document basic research). The result of this research is that India, which is a secular country, has issued a 2019 Citizenship Amendment Act (CAA) policy that is irrelevant to its constitution. If viewed through India's good policy-making process, the decision-making of CAA's policy-making is felt to be lacking in meeting the ideals of a domestic policy. This policy is also seen to be more inclined to protect the majority group, Hindus. This policy is also seen as polarizing government with the aim of building a Hindu nation, increasing their support, and strengthening their power.

1. Pendahuluan

India merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris dengan peradaban tertua di dunia yang memiliki keragaman budaya di dalamnya, yang terletak di kawasan Asia Selatan (U.S. Census Bureau, 2022). India adalah negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem tersebut, India menjadikan Presidennya sebagai kepala negara atau simbol negara dan Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan atau kepala lembaga eksekutif, serta pemimpin partai mayoritas di parlemen. India juga termasuk ke dalam urutan negara terbesar di dunia dimana ia menempati posisi ketujuh dengan penduduk terbanyak kedua yang jumlahnya mencapai 1,406,087,920 jiwa (Worldmeter, 2022). Mayoritas masyarakat India adalah pemeluk agama Hindu dengan prosentase sekitar 80%, lalu masyarakat yang memeluk agama Islam sekitar 14%, dan sisanya adalah pemeluk agama Kristen, Sikh, Budha dan lainnya (National Portal of India). India memiliki 22 bahasa yang telah diakui dalam Konstitusi India, dengan bahasa resmi Hindi dan Inggris, sesuai dengan Pasal 343 (Compendium of Language Management in Canada). Saat ini pun, India telah menjadi salah satu negara industri teratas di dunia melalui produksi pertanian. Peningkatan perekonomian India yang dimulai melalui program *Make in India* dimana ia membuka lebar investasi asing dan meningkatkan penjualan domestik, sehingga dapat dikatakan bahwa melesatnya nama India di kancah internasional tidak lepas dari campur tangan Perdana Menteri mereka, yaitu Narendra Modi yang telah menjabat sejak 2014 lalu hingga sekarang. Namun, di masa kepemimpinannya, tidak hanya hal-hal positif yang terjadi tetapi juga diikuti dengan berbagai permasalahan domestik yang sukar dihentikan.

Pertikaian domestik yang seringkali terjadi di India adalah mengenai keagamaan yang didasari oleh kurangnya rasa tenggang rasa atau solidaritas, dimana masyarakatnya saling memiliki keinginan untuk mendominasi (Rumagit, 2013). Émile Durkheim menyatakan bahwa agama merupakan kesucian yang mendasari sebuah kepercayaan dimana dapat membentuk suatu komunitas moral (umat) berdasarkan kesamaan atas apa yang dianut (Adnan, 2020). Jika dilihat dari sejarahnya, Muslim dan Hindu yang tinggal di India memang tidak pernah lepas dari peperangan mulai dari pembentukan awal negara India hingga pada masa kontemporer mengenai undang-undang diskriminatif (Saputra, 2020). Dimana pada tahun 2019 ia menetapkan kebijakan mengenai kewarganegaraan (*Citizenship Amendment Act*) yang tanpa disadari menyebabkan pertikaian antar agama serta diskriminasi. Undang-undang kewarganegaraan di India sendiri, meskipun telah beberapa kali mengalami pembaharuan atau perubahan tetapi seringkali memicu pertikaian internal dengan isu yang sama, yaitu agama maupun sosial (Wagner & Arora, 2020).

Penetapan dari *Citizenship Amendment Act* 2019 atau Undang-undang kewarganegaraan ini ditujukan untuk mengurangi tingkat imigran ilegal yang ada di India. Dimana keberadaan imigran ilegal tersebut yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di India yang kemudian menyebabkan berbagai permasalahan sosial didalamnya, mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga peningkatan kriminalitas. Oleh sebab itu, sebagai bentuk solusi dalam permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan *Citizenship Amendment Act* 2019 (CAA) ini. Sayangnya, pemerintah tidak memperhatikan secara menyeluruh mengenai keidealitasan suatu kebijakan negara, dimana harus memperhatikan seluruh aspek kondisi domestik. Alhasil, hal tersebut menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Hal ini membuat banyak masyarakat geram, khususnya warga Muslim karena undang-undang kewarganegaraan tersebut mengizinkan para imigran yang

telah tinggal di India hingga tahun 2014 yang menerima persekusi dari negara Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan serta yang memeluk agama selain Muslim akan diberikan status kewarganegaraan.

Undang-undang ini juga mewajibkan umat Muslim India agar dapat memberikan bukti mengenai kewarganegaraan India mereka, jika mereka tidak dapat membuktikannya akan ada kemungkinan para Muslim India dapat kehilangan kewarganegaraannya secara sepihak. *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019* tersebut juga dicurigai sebagai strategi politik dari partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang merupakan rezim dibawah pimpinan Modi dalam tujuannya untuk mempolarisasi India (Kumar, 2020). Ia juga tidak mengeluarkan kebijakan apapun untuk memberhentikan peristiwa ini, ia hanya meminta masyarakatnya untuk berdamai, dan tentu hal ini sangat tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Padahal, diawal kampanyenya, ia berjanji untuk menjunjung tinggi keadilan terhadap seluruh warga negaranya tanpa memandang bulu.

Uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai "Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu di India Dalam Kebijakan *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019*". India sendiri diketahui sebagai negara sekuler yang dimana pemerintahnya memberikan kebebasan bagi masyarakatnya dalam beragama, dan juga memberikan kesetaraan terhadap mereka tanpa adanya diskriminasi. Dimana hal tersebut telah tercantum dalam pembukaan konstitusi India ke 42 tahun 1976, dan juga dijelaskan pada Pasal 14,15,16 (1), 25**, 26, 27, 28, 29, dan 30 (Legislative Department). Namun, dengan diterapkannya kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019*, terlihat sangat bertentangan dengan konstitusi India yang telah ada yang walaupun ketidaksetaraan terbut juga telah terjadi sebelum adanya kebijakan tersebut, dan telah menjadi salah satu isu penting bagi permasalahan domestik India. Namun, penerapan kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019* ini membuat kondisi india semakin memanas. Dimana disebutkan bahwa dasaran dalam pembuatan kebijakan tersebut hanya untuk memberantas imigran ilegal saja, tetapi berakhir dengan diskriminasi terhadap warga Muslim karena ketidakidealan isi dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus mengenai bagaimana sebuah kebijakan dapat menjadi instrumen polarisasi politik identitas dari suatu rezim pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana bertujuan untuk menggambarkan kronologi dari suatu peristiwa dapat terjadi tanpa harus menggunakan prosedur statistik maupun cara-cara pengukuran serta dikumpulkan dalam kondisi asli atau alamiah (Kothari, 2004). Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan polarisasi penguatan nasionalisme Hindu dalam penetapan kebijakan *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019* yang dilakukan oleh pemerintah India yang dimana tidak sejalan dengan konstitusi India. yang kemudian memberikan dampak yang cukup besar terhadap kedamaian domestik. Penelitian ini juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang berdasar pada data yang berbasis dokumen (*document basic research*) yaitu data yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, undang-undang beserta website resmi pemerintah, dan berita yang relevan dengan bahasan (George, 2008). Dalam mencari jurnal atau rujukan, penulis menggunakan aplikasi *Harzing or Perish* dengan paper dalam rentangan waktu 5 tahun terakhir. Dalam menuliskan sitasi pun penulis menggunakan aplikasi *Mendeley* untuk mempermudah penulis dalam menggunakan rujukan serta menulis daftar pustaka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas dengan pendekatan primordialisme serta konsep polarisasi politik. Dimana politik identitas sendiri merupakan sebuah metode atau sistem politik dalam mengorganisir suatu identitas yang digunakan sebagai sumber daya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005). Politik identitas dapat dimaknani menjadi beberapa pemahaman yang didekatkan pada konsep identitas itu sendiri atau jati diri. Politik identitas juga dapat terbentuk dari sebuah kelompok sosial yang merasa terintimidasi dan mendapatkan bentuk diskriminasi atau bahkan merasa memiliki kekuasaan yang lebih dalam sebuah politik negara (Suryani & Azmy, 2016). Cressida Heyes berpandangan bahwa politik identitas didefinisikan sebagai tanda atas keberadaan kegiatan atau interaksi politis yang didasari pada ketidakadilan yang dirasakan oleh suatu kelompok tertentu bersama para anggotanya (Nasrudin & Nurdin, 2018). Para penguasa menggunakan politik identitas sebagai alat dalam mendorong kejayaan dari kekuasaannya dan sebagai alat manipulasi agar dapat mencapai kepentingan mereka masing-masing.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang memang dibutuhkan bagi para penguasa dan didasari pada kesamaan identitas atau karakteristik, seperti ras, etnis, agama, maupun gender yang akhirnya dapat berpengaruh pada kebijakan, pandangan, maupun nasib atas dasar keprimordialan. Primordialisme merupakan ikatan kelompok yang sangat memegang teguh kesamaan dan keistimewaan karakteristik yang dibawa secara turun menurun mulai dari tradisi, agama, maupun adat-istiadat yang berada dalam lingkungan pertamanya yang kemudian menimbulkan tindakan kolaboratif antar kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep politik identitas digunakan untuk menggambarkan bagaimana perbedaan identitas yang ada dalam suatu masyarakat digunakan sebagai polarisasi politik oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen kebijakan domestik.

Perbedaan juga terasa dalam penerapan kebijakan *Citizenship Amendment Act* 2019 dimana dalam kebijakan tersebut terdapat undang-undang kewarganegaraan yang dirasa jauh dari kata adil dan sangat terlihat lebih pro terhadap kaum mayoritas dan tidak tercermin sesuai dengan konstitusi India mengenai sekularisme. Menurut Donald Eugene Smith, sekularisme merupakan kebebasan yang diberikan pemerintah maupun negara kepada warga negaranya untuk memeluk kepercayaan tertentu dan tidak terikat pada konstitusional tertentu yang dimana negara maupun pemerintah harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada satu agama saja.

Sekularisme sendiri tertanam pada konstitusi India yang menyatakan bahwa negara India tidak mengidentifikasi dirinya sebagai negara yang dipolarisasi atau memihak salah satu agama saja, negara juga tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing agama, negara juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap individu yang memeluk agama tertentu, dan hak bagi warga negara akan diberikan sepenuhnya tidak terkait kondisi tertentu, dan menyatakan bahwa sekularisme merupakan dasaran negara untuk menciptakan persaudaraan dan kesatuan rakyat India. Sayangnya, bentuk sekularisme ini tidak direalisasikan dengan tepat oleh pemerintah, dan bahkan keberadaan sekularisme mulai terancam karena digantikan oleh komunalisme yang dapat membawa India semakin mundur.

Pemerintahan India yang kebanyakan berasal dari kelompok mayoritas tersebut menggunakan kekuasaannya untuk dapat mempengaruhi serta melindungi

kelompoknya dan mengedepankan kepentingan kelompok mayoritas tersebut dengan membuat kebijakan ini yang berkedok kepentingan sosial bagi negaranya. Narendra Modi yang merupakan pemimpin partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata, sekaligus sebagai Perdana Menteri India dari tahun 2014 memiliki kesempatan besar dalam memperkuat kekuasaannya. Hal tersebut dirasa hanyalah alibi untuk mendapatkan banyak dukungan dan memenangkan pemilu karena setelah ia terpilih, tentu saja ia kembali fokus pada identitas dan kepentingan mayoritas, yaitu Hindu.

3.2 Pembahasan

Dinamika Hubungan Agama di India

Mayoritas dan minoritas tertuju pada kuantitas individu yang membentuk suatu kelompok dengan kesamaan latar belakang (Jangid, 2019). Terdapat berbagai kelompok masyarakat mayoritas-minoritas di penjuru dunia. Klasifikasi tersebut dapat berupa agama, ras, bahasa, maupun budaya. Hal ini juga yang seringkali memicu pertikaian domestik ketika tidak adanya toleransi serta kesetaraan di dalamnya, khususnya mengenai agama. India dikenal dengan negara multikultur dan multireligi sehingga berbagai kelompok minoritas-mayoritas terbentuk di negara tersebut (Ruksin, 2018). Sebagian besar dari masyarakat India adalah keturunan Dravida yang memiliki kulit gelap dan telah menetap di India sejak zaman prasejarah, adapun masyarakat yang berkulit putih dikenal dengan bangsa Arya. Dalam bahasa pun, India diketahui berbagai bahasa yang dipakai di berbagai daerah, namun hanya bahasa Hindi dan Inggris saja yang ditetapkan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan. Adapun Hindu sebagai agama terbesar di India dan agama yang dianggap minoritas adalah Islam, Kristen, Budha, Sikh, dan Jainisme. Walaupun begitu, agama-agama minoritas tersebut telah diakui dalam konstitusi India.

Tabel 1. Berdasarkan Agama di India

No.	Agama	Persentase
1.	Hindu	80
2.	Islam	14
3.	Kristen	3
4.	Budha	1
5.	Sikh	1,7
6.	Jain	0,4

Sumber: Taqiyya, 2022

Para penganut agama minoritas di India juga mendapatkan pengakuan sesuai yang telah ditetapkan dalam konstitusi India dan Undang-undang yang dikenal dengan *National Commission for Minority Act* 1992 hal tersebut dikarenakan India menganut sistem kebijakan afirmatif (*The National Commission for Minorities Act* , 1992, 1992). Keberagaman agama di India nampaknya bukan menjadi masalah besar dalam masyarakat. Mereka awalnya hidup selaras dan berdampingan, walaupun beberapa kesalahpahaman juga pasti terjadi. Namun, konflik besar mulai muncul yang dipicu oleh permasalahan politik.

Dimulai dari tindakan partai BJP (Bharatiya Janata Party) yang dimana selalu memicu permasalahan antar masyarakat yang juga melibatkan agama sehingga dianggap sebagai partai ekstrimis Hindu. Konflik antara kaum mayoritas Hindu, dan minoritas Muslim maupun Kristen merupakan yang paling sering kali terjadi (Amin, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kegagalan dalam sebuah negara

ditambah negara tidak pernah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan juga dianggap lebih condong memihak kelompok mayoritas.

Jika dilihat dari sejarahnya, Islam memainkan peran penting dalam perjalanan pembangunan India sehingga peninggalan-peninggalan Islam di India terbilang banyak dan berakulturasi dengan kebudayaan Hindu. Oleh sebab itu ada beberapa bangunan yang memiliki struktur seperti candi dan masjid. Peristiwa awal yang menyebabkan rusaknya hubungan Hindu dengan Muslim dimulai pada tahun 1992 dimana pemimpin dari BJP (Bharatiya Janata Party) mengeklaim bahwa terdapat kuil yang lokasinya berdekatan dengan masjid Babri yang kemudian menyebabkan ketegangan antara Hindu dengan Muslim (Saroj & Bharti, 2022).

Kemudian pemimpin BJP mulai mengumpulkan massa dan melakukan pemberontakan dengan tujuan mengambil alih lokasi masjid tersebut untuk dihancurkan dan dibangun kuil karena masyarakat Hindu menganggap bahwa masjid tersebut merupakan bagian dari kuil. Peristiwa tersebut menyebabkan hubungan antara Hindu dengan Muslim berubah secara total hingga sekarang dimana berbagai konflik yang menyebabkan kekerasan terhadap kaum minoritas secara konsisten terus terjadi dan meningkat. Hal ini tentu mengakibatkan keamanan bagi kelompok minoritas terganggu dibawah pemerintahan nasionalis India.

Proses Pembuatan Kebijakan di India

Pembuatan kebijakan dilakukan pemerintah untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Dimana pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak aspek dalam memutuskan pembuatan suatu kebijakan. Adapun pembuatan kebijakan dapat dibagi menjadi beberapa karakteristik, mulai dari kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi negara sehingga dapat bersifat mendesak, lalu pembuatan kebijakan yang melalui berbagai proses, dan kebijakan yang dibentuk melalui berbagai siklus keputusan ataupun proses politik yang tidak terbatas Berikut siklus proses dalam pembuatan kebijakan di suatu negara:

1. Agenda Setting

Dalam tahap awal dari proses keseluruhan pembuatan kebijakan dalam sebuah negara ini mencakup identifikasi masalah serta aktor-aktor yang berperan didalamnya. Kebijakan dibuat berdasarkan keinginan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya sehingga kebijakan disesuaikan dengan keadaan serta kepentingan negara. Disamping itu aktor yang ikut andil didalamnya tentu tidak hanya pemerintah, melainkan berbagai media massa yang akan mempermudah untuk mempengaruhi secara cepat, dan birokrasi yang berwenang untuk merencanakan serta mengimplementasikan agenda setting.

Menurut Cobb (1976), terdapat tiga formula model inisiasi kebijakan (Knill & Tosun, 2008):

1. Model inisiatif luar (*The outside-initiative model*), mengacu pada situasi di mana kelompok warga memperoleh dukungan publik yang luas dan memasukkan suatu isu ke dalam agenda formal.
2. Model mobilisasi (*The mobilization model*), menggambarkan suatu situasi, di mana prakarsa pemerintah perlu ditempatkan dalam agenda publik untuk implementasi yang berhasil.
3. Model inisiasi dari dalam (*In the inside initiation model*), kelompok-kelompok berpengaruh dengan akses ke pengambil keputusan mengajukan proposal

kebijakan, yang didukung secara luas oleh kelompok kepentingan tertentu tetapi hanya sedikit oleh public.

Berdasarkan ketiga formulasi model inisiasi kebijakan tersebut, India dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut *the outside-initiative model* dimana masalah yang terjadi berakar dari suatu grup masyarakat yang memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat luas sehingga mereka mendukung masalah tersebut yang kemudian menjadi permasalahan formal.

Jika dianalisis dari penerapan kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019*, yang menjadi permasalahan dalam *agenda setting* adalah imigran ilegal yang banyak tinggal di India. Dimana keberadaan dari imigran ilegal tersebut memicu berbagai permasalahan sosial yang cukup banyak, mulai dari kemiskinan, pengangguran, peningkatan kriminalitas, hingga permasalahan Kesehatan.

2. Policy Formulation

Pada tahap ini, permasalahan yang ada pada *agenda setting* mulai didiskusikan dan dikonfirmasi mengenai diterima atau tidaknya permasalahan yang akan diangkat tersebut. Aktor-aktor yang ikut andil dalam proses ini diantaranya; legislaif, yudikatif, serta kelsompok kepentingan. Pokok permasalahan tersebut kemudian mulai dikaji pada tahap ini oleh aktor pemerintah hingga menemukan penyebab inti dari permasalahan yang terjadi. Dalam tahap ini, India yang merupakan negara semi-federasi membuat kebijakan yang akan ditentukan serta dipengaruhi oleh visi dari pemimpin dan partai politik yang berkuasa. Sehingga aktor yang berperan dalam tahapan ini adalah lembaga eksekutif, komite kongres, dan kelompok kepentingan.

3. Policy Adaption

Tahap ini merupakan tahap pengambilan kebijakan oleh institusi pemerintah dimana bersifat khusus. Keputusan dalam pemilihan kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh voting terbanyak maupun seperangkat faktor mengarah pada alokasi kompetensi antar aktor meliputi pengambilan kebijakan.

4. Implementation

Implementation adalah tahap dimana adanya relevansi antara tujuan kebijakan yang ingin dicapai dengan realisasi yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah. Implementasi sendiri dapat berupa kebijakan, undang-undang, ataupun hukum. Tingkat kesuksesan dari suatu implementasi dilihat dari bagaimana birokrasi maupun pemerintah mengorganisirnya. Dalam kebijakan CAA, tahap implementasinya dirasa kurang ideal dengan sebagaimana harusnya suatu kebijakan diterapkan. Respon dari masyarakat pun tidak cukup baik karena berakhir dengan berbgayaan perpecahan masyarakat yang mempengaruhi keamanan domestik.

5. Evaluation

Tahap evaluasi adalah tahap akhir dari siklus proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan yang telah melalui tahap implementasi kemudian mulai untuk dievaluasi untuk mengkaji kelayakan dari kebijakan tersebut yang juga dipengaruhi peran media. Jika hasil dari tahapan ini menunjukkan bahwa kebijakan kurang layak, maka akan dilakukan pengkajian ulang dan menjadi agenda setting yang baru.

Sekilas Mengenai Kebijakan CAA

Citizenship Amendment Act atau CAA merupakan kebijakan kewarganegaraan yang disahkan oleh Narendra Modi, Perdana Menteri India, pada

2019 lalu di Lok Sabha. Dimana kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pemberian kewarganegaraan bagi masyarakat non-Muslim (Kristen, Sikh, Budha, Jain, Parsi, dan Kristen) yang mendapat persekusi dari tiga negara tetangga, yaitu Pakistan, Bangladesh, Afghanistan yang telah tinggal di India sebelum 31 Desember 2014 (Ahmed, 2020). Dikatakan bahwa pemberian kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ancaman keamanan nasional atas imigran ilegal di negara India.

Sebelumnya, persyaratan untuk naturalisasi adalah dibutuhkan minimal 12 tahun tinggal, namun dengan adanya kebijakan CAA ini, para imigran diberikan kewarganegaraan dengan jalur cepat dimana hanya dalam 6 tahun tinggal (Hussain & Mehmood, 2021). Berbeda dengan imigran muslim, mereka akan diberikan kewarganegaraan dengan prosedur naturalisasi biasa. Akibatnya, sebagian besar dari Muslim yang tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen kewarganegaraan mereka, yang menjadi sasaran ketidakadilan kebijakan kewarganegaraan tersebut.

Awalnya kebijakan ini berbentuk RUU (Rumusan Undang-undang) atau CAB dimana diperkenalkan pada 19 Juli 2016 di Lok Sabha. RUU ini kemudian diteruskan ke Komite Parlemen Bersama pada tanggal 12 Agustus 2016 dan setelah mengalami beberapa revisi, pihak komite menyerahkan laporannya pada 7 Januari 2019. Lalu, Rumusan Undang-undang tersebut diperkenalkan di parlemen dihadapan anggota Lok Sabha ke-17 oleh pada 4 Desember 2019 dan disahkan pada 10 Desember 2019. RUU ini mendapatkan pro-kontra dari anggota parlemen. Hingga pada tanggal 12 Desember 2019 presiden India menyetujui perubahan status dari Bill ke Act dan memberlakukannya pada 10 Januari 2020 (Explained desk, 2019). Dalam menjalankannya, pemerintah India melakukannya dengan sistem sensus. Dimana para petugas melakukan kunjungan ke rumah-rumah dan memeriksa semua dokumen pembuktian kewarganegaraan dari masyarakat. Mereka yang tidak dapat membuktikan keaslian dokumen, akan mendapatkan sanksi berupa pencabutan kewarganegaraan atau bahkan dapat dideportasi.

Kebijakan *Citizenship Amendment Act* 2019 ini kemudian mendapatkan seruan kontra dari berbagai pihak. Menurut Apurba Biswas dalam penelitiannya yang berjudul "*The Citizenship Amendment Act: The Death of India*", ia berpendapat bahwa penetapan *Citizenship Amendment Act* yang menyebabkan terjadi protes secara besar-besaran hingga merusak persatuan bangsa dapat menjadi penyebab utama hancurnya negara India (Biswas, 2020). Ketika keamanan negara sudah tidak terjamin lagi, pemberontakan akan terus terjadi dimana tindakan pemberontakan tersebut dilakukan untuk menghindari diri mereka dari ancaman.

Para imigran non-Muslim maupun Muslim, keduanya memasuki wilayah India dengan cara yang sama, namun hanya imigran non-Muslim saja yang diberikan kewarganegaraan secara legal. Konstitusi India berdasar pada sekularisme yang sebenarnya membebaskan warga negaranya untuk beragama namun, kebijakan baru yang ditetapkan tersebut terlihat membedakan agama. Keberadaan *Citizenship Amendment Act* (CAA) 2019 nampaknya hanya memberikan dampak buruk dalam perdamaian domestik India. Kebijakan ini sangat merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat minoritas dimana hak sebagai warga negaranya telah direnggut oleh pemerintah.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan konstitusi India yang berdasar pada sekularisme dan kebijakan tersebut dianggap sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas untuk mendiskriminasi Muslim. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga telah melanggar berbagai standar hukum internasional, yang meliputi Konvensi Pengungsi 1951, deklarasi universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi PBB yang menentang penyiksaan 1985 (Mohsin & Raza, 2020). Sehingga kebijakan Citizenship Amandment Act 2019 dapat disebut sebagai undang-undang diskriminatif yang melanggar prinsip-prinsip sekularisme dan kesetaraan dalam Konstitusi India.

Konstitusi India melarang diskriminasi agama dan menjamin semua orang dalam yurisdiksi teritorialnya persamaan di depan hukum. Namun, sebaliknya, Citizenship Amandment Act 2019 menciptakan kriteria sewenang-wenang berdasarkan agama untuk naturalisasi imigran dari beberapa negara tetangga yang dipilih. Dengan demikian, *Citizenship Amandment Act 2019* juga tidak sesuai dengan aturan dan prinsip hukum internasional karena bersifat diskriminatif atas dasar agama.

Hubungan Kebijakan CAA dalam Memperkuat Nasionalisme Hindu

Ketidakrelevanan Kebijakan CAA Dengan Konstitusi

Kebijakan *Citizenship Amendment Act* (CAA) 2019 diperuntukkan bagi masyarakat non-Muslim yang mendapatkan persekusi dari tiga negara tetangga (Pakistan, Bangladesh, Afghanistan) dan mengecualikan Muslim didalamnya sehingga kebijakan tersebut dikatakan sebagai kebijakan pendiskriminasian terhadap Muslim India yang memicu pemberontakan besar di India. Menurut Monika Verma dalam penelitiannya yang berjudul "*Citizenship (Amendment) Act, 2019: The Pernicious Outcomes of the Altering Equation of Citizenship in India*" menjelaskan bahwa kebijakan CAA tersebut jauh dari kata adil dan tidak memberikan kesetaraan bagi warga negaranya serta telah melanggar prinsip kesetaraan dalam pasal 14 konstitusi India (Verma, 2021).

Undang-undang tersebut tidak hanya melakukan pendiskriminasian terhadap kaum Muslim di dalam India tetapi juga terhadap para pengungsi Muslim yang sebenarnya juga membutuhkan pertolongan pengakuan kewarganegaraan serta ketidakefektifan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan. Berikut beberapa pasal dalam konstitusi India yang menegaskan mengenai sekularisme di India:

Article 14 : Menyatakan bahwa tanpa terkecuali, seluruh masyarakat India memiliki kesetaraan di depan hukum atau memiliki perlindungan hukum yang sama dari hukum India

Article 15 : Menyatakan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi warga negara hanya berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin, tempat lahir atau salah satunya.

Article 16 : Menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan kerja yang sama.

Article 25-30 : Menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam beragama dan mendapatkan kesetaraan dalam berbagai bidang tanpa pengecualian.

Adapun ketidakrelevanan konstitusi India dengan perubahan isi dari kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019* dapat dilihat dalam (Legislative Department, 2019):

Pasal 2, mengenai kelompok atau komunitas minoritas, yaitu Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen yang mendapat persekusi dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan tidak akan diperlakukan sebagai imigran ilegal untuk tujuan Undang-Undang tersebut.

Pasal 6B, mengenai naturalisasi dimana siapapun yang disebutkan dalam ketentuan pertama harus mengajukan naturalisasi setelah memenuhi keseluruhan syarat yang berakhir pada pemberian kewarganegaraan bagi mereka.

Dapat dilihat bahwa dalam kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019* menyatakan pengecualian terhadap Muslim India, yang menyebabkan keberadaan Muslim disana dapat terancam dengan adanya sistem naturalisasi. Ketidakbersinambungan antara konstitusi India dengan kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019* tersebut yang kemudian dapat dikatakan bahwa pemerintah hanya pro terhadap masyarakat selain Muslim, dan hanya melindungi masyarakat mayoritas saja dan tidak memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat Muslim India.

Diskriminasi Terhadap Muslim

Banyaknya imigran ilegal yang masuk ke India hingga tahun 2014 membutuhkan penanganan sehingga pemerintah membuat solusi dengan memberikan naturalisasi kepada mereka yang dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sayangnya, masyarakat Muslim yang berasal dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan tidak dapat diberikan naturalisasi kewarganegaraan karena tidak sesuai dengan persyaratan agama yang ada dalam kebijakan. Pemerintah menganggap bahwa Muslim yang berasal dari ketiga negara tersebut bukanlah masyarakat minoritas yang mendapat persuasi. Faktanya, kaum Ahmadiyah dan Hazara di Pakistan serta Afghanistan juga mengalami penganiayaan yang sama namun tetap belum ada bantuan apapun (Ahmad, 2017). Pemerintah India menyatakan bahwa Muslim tidak mungkin mendapatkan persekusi di negara yang mayoritasnya beragama Muslim.

Menjadikan India Sebagai Negara Hindu Terbesar

Kebijakan ini juga dikatakan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk dapat mempolarisasi negara. Narendra Modi dan mayoritas anggota partai Bharatiya Janata Party (BJP) diketahui memeluk agama Hindu dan pedoman mereka ada pada ideologi hindutva (Banerjee, 2020). Hal ini juga dipengaruhi oleh visi politik dimana bertujuan untuk membawa kembali kejayaan dari kerajaan Hindu di Asia Selatan. Adapun alasan yang mendasari pemerintah menerapkan kebijakan tersebut adalah untuk menunjukkan keseriusannya dalam komitmen proyek Hindutva. Walaupun konstitusi India melarang diskriminasi atas dasar agama, tetapi pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menutup mata dan hanya berfokus pada tujuan kelompoknya (Margiansyah, 2022).

Istilah Hindutva mulai muncul sekitar tahun 1923 yang dicetuskan oleh VD Savarkar (Paleri, 2022). Ideologi ini lahir sebagai respon terhadap penjajahan inggris sebagai bentuk politik perlawanan untuk menunjukkan kekuatan politik serta mengambil alih berbagai ruang yang telah dijamah oleh penjajah maupun pihak luar selain Hindu. Dalam pandangan Hindutva Savarkar, Muslim dianggap sebagai ancaman utama bagi kelompoknya sehingga mereka harus dimusnahkan. Oleh sebab itu, Hindu berusaha untuk mendominasi segala bidang, khususnya politik sehingga kelompok minoritas dapat terserap masuk atau ikut tunduk terhadap cara hidup Hindutva. Ideologi ini menyatakan bahwa India sepenuhnya milik orang Hindu, Jain, Budha, dan Sikh.

Dengan latar belakang pemerintah India yang sebagian besar menganut ideologi ini tidak heran disetiap kebijakan yang diterapkannya selalu membangun sentimen islamophobia dan melindungi kelompoknya. Hindutva lebih banyak terikat pada politik kekuasaan dan dominasi dimana bertujuan untuk memblockade

kelompoknya dari campur tangan orang luar dan juga melindungi kemurnian kelompok agamanya dan yang dianggap terancam. Kebijakan *Citizenship Amendment Act* (CAA) 2019 juga termasuk kebijakan yang didasari oleh ideologi hindutva (Chandrachud, 2020). Dimana kebijakan tersebut dapat memberikan kestabilan bagi rezim dengan memojokkan masyarakat Muslim sehingga dapat mempermudah pemerintah untuk membangun negara Hindu terbesar dengan mengganti ideologi sekuler menjadi ideologi Hindutva.

Meningkatkan Dukungan Terhadap Pemerintahan

Narendra Modi telah menjabat sebagai Perdana Menteri India sejak 2014 silam hingga sekarang sekaligus sebagai ketua dari partai BJP (Bharatiya Janata Party). Setelah memenangkan dua kali pemilu, anggota partainya menempati kursi terbanyak di parlemen dan ia pun dikenal sebagai pemerintah yang otoriter. Modi dan partainya dianggap sebagai ekstrimis Hindu dimana mereka berusaha untuk memperkuat identitas Hindu di India dengan mengobarkan pernyataan-pernyataan maupun gerakan anti-Pakistan ataupun anti-Muslim (Jangid, 2019).

Mereka sering kali menjadikan Muslim sebagai target dalam mendapatkan keuntungan lebih bagi rezimnya. Pada masa pemilu tahun 2014 lalu, Modi dan partainya memiliki dua slogan utama dalam menarik dukungan suara, yaitu slogan pembangunan mengenai perkembangan ekonomi, infrastruktur, maupun fasilitas publik dimana menargetkan masyarakat perkotaan India dan slogan mengenai ideologi Hindutva juga tidak luput dari Modi dan partainya dimana slogan tersebut digunakan untuk menarik suara masyarakat mayoritas, Hindu. Hindutva kembali digunakan Modi sebagai senjata utama dalam pemilu 2019 dimana menggambarkannya sebagai pelindung bangsa (Hall, 2019).

Hindutva telah diterapkan dalam sistem politik india dan dijadikan kebijakan domestik andalan oleh Modi sehingga berkembangannya cukup signifikan dan lebih kuat dari sebelumnya (Mahmood & Kallimullah, 2019). Ideologi tersebut juga menjadi pemicu diskriminasi terhadap kaum minoritas sering terjadi. Pada masa pemerintahan Modi, kekejaman terhadap Minoritas, khususnya Muslim, semakin meningkat. Para pemimpin BJP secara terbuka dalam setiap pidato mereka melontarkan pernyataan-pernyataan kebencian dan menghina umat muslim serta memprovokasi umat Hindu.

Berbagai tindakan kekerasan verbal maupun non-verbal secara konsisten terus terjadi terhadap kaum Muslim. Dimulai dari pemaksaan pembongkaran masjid Babri pada tahun 1992 lalu yang memewaskan kurang lebih ratusan kaum Muslim, kemudian pembantaian di wilayah Gujarat pada tahun 2002 yang menewaskan sekitar 1000 orang dimana peristiwa tersebut menyebabkan eksekusi terencana terhadap Muslim, para perusuh Hindu juga membakar harta benda umat Muslim, memperkosa wanita dan anak perempuan. Namun, pemerintah disana tidak mengambil tindakan apapun dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu dilanjutkan dengan penghapusan pasal 370 mengenai status Kashmir serta pasal 35 A mengenai status Assam, dan penetapan kebijakan *Citizenship Amendment Act* (CAA) 2019 yang menyebabkan konflik domestik secara besar-besaran terjadi yang berdampak pada tindak pendiskriminasian terhadap Muslims semakin luas (Saputra, 2020).

Perdana Menteri India Narendra Modi merupakan salah satu petinggi yang sangat berpengaruh dalam kekuatan Hindu. Dalam peraturan yang dia buat, ia seringkali menargetkan Muslim yang berujung pada deportasi maupun hukuman penjara. Walaupun begitu, hal tersebut tidak mengurangi dukungan publik

terhadapnya karena dianggap sebagai pemimpin yang tegas dimana berani mengambil resiko dan mengambil tindakan yang berlawanan dari kesepakatan politik India yang ada.

Ia dengan berani menggunakan retorika yang bernuansa memecah belah masyarakat dengan menjadikan suatu kelompok sebagai kambing hitam, mendominasi media massa dengan memperbolehkan mereka meliput mengenai kelemahan India, bahkan ia menghapuskan kesepakatan politik dimana anggota dari partai oposisi akan menjabat sebagai kepala *External Affairs Committee dalam India's Parliamentary Standing Committees* yang dimana kesepakatan ini telah berlaku sejak India merdeka (Saroj & Bharti, 2022). Sebagai gantinya, Modi menunjuk anggota Bharatiya Janata Party (BJP) sebagai penggantinya. Ditangan Narendra Modi, India telah berada dalam pergolakan nasionalisme yang tiada henti dimana standar tata sosial adalah kontrol dari penguasa. Dengan penerapan *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019* juga memberikan peluang bagi Modi untuk memperkuat rezimnya dan mendapatkan dukungan lebih dari imigran-imigran ilegal yang ia bantu.

4. Kesimpulan

Jika dilihat dari konsep politik identitas yang berdasar pada pendekatan primordialisme bahwa penetapan kebijakan *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019* di India oleh Perdana Menteri, Narendra Modi, mempengaruhi stabilitas kekuatan nasionalisme Hindu. Dimana kebijakan ini menjadi salah satu jembatan yang dapat memberikan fleksibilitas pemerintah dalam mempolarisasi negara India. Anggota Parlemen India banyak diisi oleh partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang mayoritas adalah masyarakat Hindu serta masyarakatnya yang didominasi oleh pemeluk agama Hindu sehingga kekuatan kelompok Hindu dibutuhkan untuk mendapatkan rezim yang stabil. Dengan hanya memberikan kewarganegaraan bagi masyarakat non-Muslim saja, dapat dilihat bahwa pemerintah ingin mengumpulkan massa dan menambah dukungan terhadap rezim. Narendra Modi juga ingin membangun image india untuk mendapatkan simpati masyarakat Hindu yang berposisi sebagai mayoritas untuk melihat kebaikan dari pemerintahannya. Akibat dari kebijakan ini, Muslim akhirnya akan terpojok dan mendapatkan diskriminasi, apalagi mereka yang dianggap tidak dapat membuktikan dokumen kewarganegaraan, bisa saja dideportasi. Hal ini juga diperparah dengan semakin gencarnya pemerintah India menanamkan ideologi Hindutva dalam masyarakat, dimana akan sangat melindungi kelompok Hindu dan mengobarkan sentimen anti-Muslim karena menganggap Muslim sebagai sebuah ancaman. Jika Hal ini terus berlanjut tanpa adanya resolusi dari pemerintah, Muslim India akan berakhir keluar secara paksa dari India dan pemerintah dapat dengan mudah membangun negara Hindu terbesar, sesuai dengan tujuan ideologi Hindutva. Pemerintah India seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai sekularisme dan kesetaraan yang menjadi pedoman bagi negaranya.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang telah bersabar dan memberi dukungan secara maksimal terhadap penulis, begitu juga dengan teman-teman dan orang terkasih yang selalu mendampingi serta memberikan support secara jasmani dan rohani terhadap penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak M. Syaprin Zahidi, dan Bapak Mohd. Agoes Aufiya selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam memberikan saran terhadap penelitian ini dan terimakasih juga kepada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah

memfasilitasi penelitian ini. Secara khusus, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Jurnal Sang Pencerah yang telah berkenan untuk menerbitkan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adnan, G. (2020). *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan* (S. Gade (ed.); Cetakan I). Ar-raniry Press.
- Ahmad, N. (2017). *The Status of Refugees in India*. Fair Observer.
- Ahmed, H. (2020). *Making Sense of India ' s Citizenship Amendment Act 2019 Process , Politics , Protests*. IFRI.
- Amin, S. (2014). Hubungan Islam, Hindu dan Kristen di India : Studi Terhadap Pemikiran Keagamaan Syaid Ahmad Khan (1817-1898) Dan Abul Kalam Azad (1888-1958). *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, 6(2), 179–187.
- Banerjee, D. (2020). *The Nation and Its Aliens: Contentions of Citizenship Under a Hindu Nationalist Regime*. Central European University.
- Biswas, A. (2020). The Citizenship Amendment Act: The Death Of India. *The Law Brigade Publisher*, 5, 1–4.
- Chandrachud, A. (2020). Secularism and the Citizenship Amendment Act. *Indian Law Review*, 4(2), 138–162. <https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1757927>
- Compendium of Language Management in Canada. (n.d.). *Language Provisions in the Constitution of the Indian Union*. U Ottawa.
- Explained desk. (2019). *Explained: Why the Citizenship Amendment Bill is dead, for now*. Indianexpress.Com.
- The National Commission for Minorities Act , 1992*, 1 (1992) (testimony of Official Gazette).
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research*. Princeron University Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19936-5_3
- Hall, I. (2019). India's 2019 General Election: National Security and the Rise of the Watchmen. *Round Table*, 108(5), 507–519. <https://doi.org/10.1080/00358533.2019.1658360>
- Hussain, N., & Mehmood, K. (2021). Impact Of CAA-2019 On Minority Communities In India And Neighboring States: Issues And Challengs In Its Implementation. *International Journal of Human Right*, 8(XXI).
- Jangid, K. (2019). Modi ' s malignant anti-Muslim vision for India is becoming reality. *Haaretz.Com*, 1–4.
- Knill, C., & Tosun, J. (2008). *Policy Making*. 11.
- Kothari, C. . (2004). Research Methodology. In *New Age International Publisher* (Second Rev). New Age International Publisher.
- Kumar, N. (2020). The Citizenship Amendment Act 2019 (CAA) And National Register Of Citizens (NCR): The Cuteness Law In India. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 3866–3875.

- Legislative Department. (n.d.). *The Constitution (Forty-Second Amendment) ACT, 1976*. Legislative.Gov.In.
- Legislative Department. (2019). *The Gazette of india*. Part II-Section 1.
- Mahmood, A., & Kallimullah. (2019). Role of Hindutva and Pragmatism in Modi's Foreign Policy Towards Pakistan. *Journal of Contemporary Studies*, VIII(2), 69–83.
- Margiansyah, D. (2022). Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 263–300. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.13868>
- Mohsin, A., & Raza, H. (2020). The Legality of the Citizenship (Amendment) Act 2019 under the Constitution of India and International Law. *PCL Student Journal of Law*, IV(I), 31–54.
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik: Pilkada DKI Periode 2018-2022. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 3.
- National Portal of India. (n.d.). *Indian Profile*. India.Gov.In.
- Paleri, D. (2022). The New Hindutva and Contradictions. *Economic & Political Weekly*, LVII(19), 27–28.
- Ruksin, R. U. (2018). Institusi Minoritas Dan Struktur Sosial Di India. *Harmoni*, 17(1), 7–26. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.289>
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2).
- Saroj, K. A., & Bharti, S. S. (2022). *Focus 83 – Impact of Hindu Nationalism in India ' s Foreign Policy Conduct* (pp. 1–15). SADF. <https://doi.org/10.48251/SADF.ISSN.2406.5633.F83>
- Setyaningrum, A. (2005). Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial. In *Mandatory* (Vol. 2, Issue 2). Mandatory.
- Suryani, & Azmy, A. S. (2016). Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru). In *Puslitpen LP2M*.
- Taqiyya, A. (2022). *Agama Warga Negara India dan Persentasenya*. International Sindonews.
- U.S. Census Bureau. (2022). *India Independence Day (1947): August 15, 2022*. U.S. Census Bureau, International Database.
- Verma, M. (2021). Citizenship (Amendment) Act, 2019: The Pernicious Outcomes of the Altering Equation of Citizenship in India. *Conflict, Justice, Decolonization: Critical Studies of Inter-Asian Societies*, 1–7.
- Wagner, C., & Arora, R. (2020). India ' s Citizenship Struggle. *SWP Comment*, 3. <https://doi.org/10.18449/2020C03>